

**PENGARUH PENDAPATAN PER KAPITA, BELANJA PEMERINTAH
BIDANG PENDIDIKAN DAN RASIO KETERGANTUNGAN
TERHADAP INDEKS PENDIDIKAN DI KABUPATEN
MUSI RAWAS PROPINSI SUMATERA SELATAN**

TESIS



Oleh :

WIDODO
NIM. C2A011154

**UNIVERSITAS BENGKULU
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2013**

**PENGARUH PENDAPATAN PER KAPITA, BELANJA PEMERINTAH
BIDANG PENDIDIKAN DAN RASIO KETERGANTUNGAN
TERHADAP INDEKS PENDIDIKAN DI KABUPATEN
MUSI RAWAS PROPINSI SUMATERA SELATAN**

TESIS

**Diajukan Kepada
Universitas Bengkulu
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister**

Oleh :

WIDODO
NIM. C2A011154


**UNIVERSITAS BENGKULU
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2013**


Tesis Oleh **Widodo** ini
Telah diperiksa dan di setujui untuk diuji

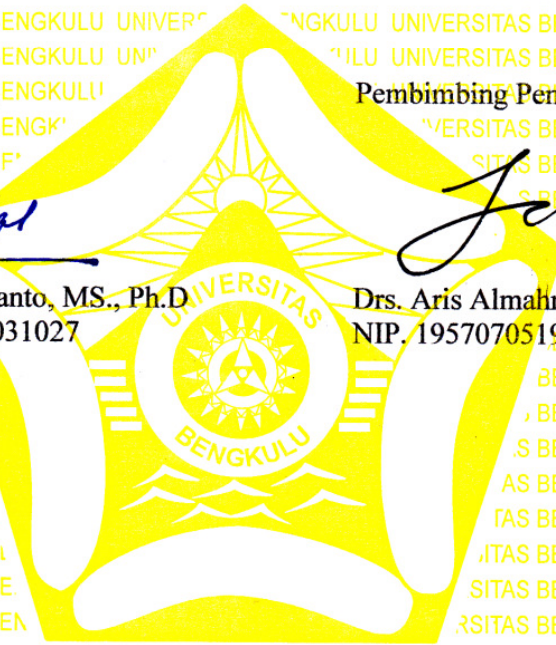
Bengkulu, Juni 2013

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Drs. Handoko Hadiyanto, MS., Ph.D
NIP. 195906161986031027


Drs. Aris Almahmudi, MA
NIP. 195707051987021002



Mengetahui,
Wakil Ketua Bidang Akademik


Dr. Mochamad Ridwan, SE., MP
NIP. 196107101988031003

Tesis oleh **Widodo** ini
Telah dipertahankan didepan dewan penguji pada hari Senin, 24 Juni 2013

Dewan Penguji :

Ketua,



Drs. Handoko Hadiyanto, MS., Ph.D
NIP. 195906161986031027

Anggota,



Drs. Aris Almahmudi, MA
NIP. 195707051987021002

Anggota,



Dr. Mochamad Ridwan, SE., MP
NIP. 196107101988031003

Anggota,



Bambang Agoes Hermanto, SE., M.Sc
NIP. 196208191988031001

Mengotahui :

Ketua Program,



Drs. Handoko Hadiyanto, MS., Ph.D
NIP. 195906161986031027



Motto :

*“Dengan Ilmu Manusia akan Bisa, Namun Tanpa Agama
Manusia akan Binasas”*

(Penulis)

Kupersembahkan untuk :

- * Istriku Tercinta (J u i t a)*
- * Anak-anakku Leonardo Dan
Yuan Putra buah Kasih Kami
Yang Tersayang.*
- * Rekan-rekan Seperjuangan*
- * Almamater*



PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis berjudul:

**PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA, BELANJAPEMERINTAH BIDANG
PENDIDIKAN DAN RASIO KETERGANTUNGAN TERHADAP INDEKS
PENDIDIKAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Yang diajukan untuk diuji pada tanggal 24 Juni 2013 adalah hasil karya saya.

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya aku seolah-olah tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tesis yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Bengkulu, 24 Juni 2013

Yang Membuat Pernyataan,

W I D O D O

**THE IMPACT OF PERCAPITA INCOME, GOVERNMENT BUDGETING ON
EDUCATION AND DEPENDENCY RATIO TOWARD EDUCATIONAL
INDEX OF MUSI RAWAS REGENCY**

Widodo¹⁾
Handoko Hadiyanto²⁾
Aris Almahmudi³⁾

ABSTRACT

The objective of the study is to find out the impact of percapita income, government budgeting on educational needs and dependency ratio toward index of education development. This research used secondary data which gained from some government institutions of Musi Rawas regency. To analyze the data, this study used partial F-test and t-test. Based on the result of the data analysis, this study concludes that (1) percapita income giving insignificant impact to the index of education development; (2) government budgeting on educational needs giving insignificant impact to the index of education development and (3) dependency ratio giving negative and significant impact to the index of education development.

Keywords: percapita income, budgeting on education, dependency ratio, index of education development

- 1) *Student*
- 2) *Pime Advisor*
- 3) *Co Advisor*

**PENGARUH PENDAPATAN PER KAPITA, BELANJAPEMERINTAH BIDANG
PENDIDIKAN DAN RASIO KETERGANTUNGAN TERHADAP INDEKS
PENDIDIKAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

Widodo¹⁾
Handoko Hadiyanto²⁾
Aris Almahmudi³⁾

RINGKASAN

Penelitian didasarkan pada paradigm pembangunan yang telah mengalami pergeseran, yaitu pembangunan yang berorientasi pada produksi (*production centered development*) pada decade 60-an ke paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution growth development*) selama decade 70-an. Selanjutnya pada decade 80-an, muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need development*), dan akhirnya menuju paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia (*human centered development*) yang muncul pada tahun 1990-an. Dengan terpusatnya pembangunan pada pembangunan manusia, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pendapatan per-kapita, belanja pemerintah bidang pendidikan dan rasio ketergantungan terhadap indeks pendidikan di kabupaten Musi Rawas 1997 sampai tahun 2011. Jenis penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan *exploratory*. Pendekatan Exploratory bertujuan memberikan gagasan, wawasan dan pemahaman atas situasi permasalahan yang dihadapi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Untuk menganalisa data digunakan uji t parsial dan uji F keseluruhan dan uji t.

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) pengaruh pendapatan per-kapita penduduk Kabupaten Musi Rawas terhadap indeks pendidikan adalah **tidak signifikan**; (2) pengaruh pengelurahan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam bidang pendidikan terhadap indeks pendidikan adalah **tidak signifikan** dan (3) pengaruh rasio ketergantungan di Kabupaten Musi Rawas terhadap indeks pendidikan adalah **negatif dan signifikan**.

Sehubungan dengan hasil penelitian maka pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya; pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian; pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka; oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja; pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal; pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan; dan

pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

- 1) Mahasiswa
- 2) Pembimbing Utama
- 3) Pembimbing Pendamping

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “*Pengaruh Pendapatan Perkapita, Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Rasio Ketergantungan Terhadap Indeks Pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan*” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Perencanaan Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs.Handoko Hadiyanto,MS.,Ph.D selaku dosen pembimbing utama sekaligus sebagai direktur Program Pasca Sarjana Magister Perencanaan Pembangunan (MPP) Universitas Bengkulu yang telah dengan sabar dan teliti memberikan arahan dan koreksi selama proses penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Drs.Aris Almahmudi,MA. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah dengan sabar dan teliti memberikan arahan dan koreksi selama proses penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Dr. Mochamad Ridwan,SE.,MP. dan bapak Bambang Agoes Hermanto, SE.M.Sc.
4. Bapak Dr.Ridwan Nursai selaku dekan fakultas ekonomi Universitas Bengkulu
5. Bapak Dr. Mochamad Ridwan,SE.,MP. selaku wakil ketua bidang akademik program Magister Perencanaan Pembangunan (MPP) Universitas Bengkulu.
6. Bapak dan ibu Asisten Direktur dan seluruh staf administrasi Program Pasca Sarjana Magister Perencanaan Pembangunan (MPP) Universitas Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada penulis
7. Bapak dan ibu dosen Program Pasca Sarjana Magister Perencanaan Pembangunan (MPP) Universitas Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Bapak Bupati Musi Rawas yang telah memberikan izin belajar untuk mengikuti kuliah pada program Magister Perencanaan Pembangunan di Universitas Bengkulu.

9. Kepala BPS dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas yang telah member data dalam penyusunan Tesis ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan berlipat ganda. Amin.

Bengkulu, 24 Juni 2013

Penulis

W i d o d o

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul	i
Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Motto dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian Karya Tulis	v
Abstract	vi
Ringkasan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Analisis	20
2.4 Hipotesis	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Defenisi Operasional	22
3.3 Jenis dan Sumber Data	25
3.4 Metode Pengumpulan Data	25
3.5 Metode Analisis	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Hasil Penelitian	31
4.2 Pembahasan	42
4.3 Implikasi Hasil Penelitian	46
BAB V PENUTUP	49
5.1 Simpulan	49
5.2 Saran	49
5.3 Keterbatasan Penelitian	50
5.4 Rekomendasi untuk Penelitian Lebih Lanjut	50
DAFTAR PUSTAKA	51
Lampiran-lampiran	53

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1	Indeks Pendidikan Kab. Musi Rawas 1997-2011	31
Tabel 4.2	PDRB Kabupaten Musi Rawas 1997-2011	32
Tabel 4.3	Belanja Bidang Pendidikan Kabupaten Musi Rawas 1997-2011	33
Tabel 4.4	Rasio Ketergantungan Kabupaten Musi Rawas	34
Tabel 4.5	Ringkasan Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda	35
Tabel 4.6	Hasil Uji Stasioneritas Pendapatan Per-Kapita	39
Tabel 4.7	Hasil Uji Stasioneritas Belanja Bidang Pendidikan	39
Tabel 4.8	Hasil Uji Stasioneritas Rasio Ketergantungan	40
Tabel 4.9	Hasil Estimasi Model Dengan Metode OLS	42
Tabel 4.10	Persentase Belanja Bidang Pendidikan Kab. Musi Rawas	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.3 Kerangka Analisis	20

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Hasil Uji Multikolinearitas	53
Lampiran 2 Hasil Uji Heteroskedasitas	54
Lampiran 3 Hasil Uji ADF	55
Lampiran 4 Hasil Uji dengan Metode OLS	57
Lampiran 5 Hasil Uji Root Test/Stationer	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, pemikiran tentang pembangunan (paradigma) telah mengalami pergeseran, yaitu pembangunan yang berorientasi pada produksi (*production centered development*) pada decade 60-an ke paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution growth development*) selama decade 70-an. Selanjutnya pada decade 80-an, muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need development*), dan akhirnya menuju paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia (*human centered development*) yang muncul pada tahun 1990-an.

Pembangunan manusia menurut Mahbub UI Haq (Ranish and Stewart : 2000) didefinisikan sebagai peningkatan kondisi manusia sehingga manusia hidup lebih lama, lebih sehat dan hidup lebih lengkap. Dalam pembangunan pada konsep pembangunan manusia dihubungkan dengan kesejahteraan fisik manusia, seperti kesehatan, nutrisi dan pendidikan, dan hal-hal lain untuk memperluas pilihan dan meningkatkan kekuatan termasuk partisipasi, kebebasan politik dan aspek-aspek budaya.

Sementara itu didalam Human Development Report 2001, pembangunan adalah perluasan pilihan manusia agar hidup mempunyai nilai dengan berdasar pada pembangunan kemampuan manusia, hal-hal yang dapat dilakukan manusia atau ada dalam hidup (*human development report, hal 9*). Pembangunan kemampuan manusia adalah kemampuan yang paling pokok untuk pembangunan manusia, yaitu untuk mendapat hidup yang lebih lama dan sehat, berpengetahuan dan dapat mengakses sumber-sumber yang diperlukan untuk standar kehidupan.

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai focus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat)

dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Indeks pembangunan manusia mencakup tiga komponen yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli. Kesehatan diukur dengan angka harapan hidup berdasarkan rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Konsep pendidikan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. UNDP dalam publikasi tahunan Human Development Report (HDR) sejak 1995 menggunakan indikator partisipasi sekolah dasar, menengah dan tinggi sebagai pengganti rata-rata lama sekolah. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Komponen pendapatan/daya beli diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita riil yang telah disesuaikan sebagai ukuran komponen tersebut.

Sebelum krisis, Indonesia cukup sukses dalam memenuhi sejumlah hak-hak dasar menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi kedalam pembangunan manusia yang cepat dan merata. Akan tetapi keberhasilan ini sebagian besar dibiayai melalui belanja masyarakat, bukan belanja pemerintah.

Untuk menjembatani ketimpangan dalam pendidikan dibutuhkan peningkatan belanja pemerintah karena hasil perbaikan dibidang pendidikan akan menjadi barang public yang manfaatnya dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Jika masyarakat semakin terdidik, maka ekonomi semakin produktif sehingga pada gilirannya pendapatan nasional akan meningkat. Individu jelas tidak akan membuat keputusan dengan pertimbangan tersebut; jika keputusan diserahkan sepenuhnya kepada individu-individu barangkali investasi dibidang pendidikan tidak akan pernah memadai.

Indeks Pendidikan adalah Angka atau bilangan yang menunjukkan tingkat atau ranking dalam bidang Pendidikan. Indeks Pendidikan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun lainnya). Rata-

rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas diseluruh jenjang pendidikan yang pernah dijalani.

Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dihitung pada penduduk usia 15 tahun keatas dengan pertimbangan mereka dianggap sebagai penduduk dewasa sehingga mampu melakukan pilihan-pilihan dalam hidup secara mandiri. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis. Indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Selain meningkatkan belanja pemerintah di sector pendidikan, perlu juga dilakukan langkah terobosan untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, sehingga mereka mampu menyekolahkan anak anaknya hingga pendidikan tertinggi.

Di pedesaan pada umumnya, penduduknya mempunyai banyak anak sehingga rasio ketergantungannya tinggi. Hal ini mengakibatkan beban keluarga menjadi berat sehingga orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya dan bahkan untuk mengurangi beban keluarga sehingga orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya dan bahkan untuk mengurangi beban keluarga maka anak disuruh membantu orang tua bekerja.

Untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, kabupaten Musi Rawas menetapkan sasaran :

1. Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan dengan mendirikan Unit Sekolah Baru untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, minimal tiap Kecamatan ada satu SMA/SMK Negeri dan dua SMP Negeri.
2. Meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pendidikan sebesar 83,33 pada tahun 2011.
3. Adanya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, ditandai dengan didirikannya beberapa SMK Negeri
4. Adanya efektifitas dan efisiensi sekolah (APS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2011 sebesar 8,2 tahun serta AMH sebesar 98,23 %.
5. Belanja pemerintah bidang pendidikan, minimal 20 % dari APBD tiap tahunnya.

6. Memperkecil angka ketergantungan penduduk terhadap keberhasilan pendidikan

Adapun data pendapatan per kapita, belanja pemerintah bidang pendidikan, rasio ketergantungan dan indeks pendidikan di Kabupaten Musi Rawas lima tahun terakhir seperti yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Pendapatan Perkapita, Belanja Bidang Pendidikan, Rasio Ketergantungan dan Indeks Pendidikan Kabupaten Musi Rawas

No	Tahun	Pendapatan Perkapita	Belanja Pemerintah bidang Pendidikan	Rasio Ketergantungan	Indeks Pendidikan
1	2007	4,171,356	50,546,009	0,57	78,73
2	2008	4,403,948	51,554.591	0,55	79,00
3	2009	4,612,432	55,651,411	0,53	79,61
4	2010	4,682,658	56,765,257	0,54	82,03
5	2011	4,820,922	57,951,651	0,52	83,33

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas

Tabel 1.1 mengindikasikan bahwa pendapatan per kapita dan belanja pemerintah tiap tahun meningkat, rasio ketergantungan penduduk menurun, dan indeks pendidikan selalu meningkat selama kurun waktu lima tahun.

Berdasarkan uraian dan pengertian tersebut penulis tertarik untuk meneliti apakah ada pengaruh pendapatan per kapita, belanja pemerintah pada bidang pendidikan dan rasio ketergantungan terhadap indeks pendidikan di Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itulah maka penelitian ini berjudul: *“Pengaruh Pendapatan per Kapita, Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Rasio Ketergantungan Terhadap Indeks Pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan”*.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada permasalahan – permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh pendapatan per kapita, belanja pemerintah bidang pendidikan dan rasio ketergantungan terhadap indeks pendidikan di kabupaten Musi Rawas dari tahun 1997 sampai tahun 2011 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: menganalisis pendapatan per kapita, belanja pemerintah bidang pendidikan dan rasio ketergantungan terhadap indeks pendidikan di kabupaten Musi Rawas dari tahun 1997 sampai tahun 2011

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini :

a. Aspek teoritis

Terdapat hasil yang bervariasi antara penelitian di negara maju dengan negara berkembang sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pengaruh pendapatan per kapita, belanja pemerintah dalam bidang pendidikan dan rasio ketergantungan terhadap indeks pendidikan.

b. Aspek praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas tentang upaya – upaya untuk menanggulangi masalah – masalah pendidikan.

2. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan akan pentingnya factor pendapatan per kapita, belanja pemerintah bidang pendidikan dan rasio ketergantungan dalam meningkatkan indeks pendidikan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas. Adapun yang menjadi variabel penelitian ini adalah: pendapatan per-kapita, belanja pemerintah bidang pendidikan dan rasio ketergantungan terhadap indeks pendidikan di kabupaten Musi Rawas tahun 1997-2011.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep pembangunan sumber daya manusia.

Inti dari pembangunan manusia berhubungan dengan 3 (tiga) aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Ketiga aspek ini dipakai dasar oleh UNDP untuk menghitung *Human Development index (HDI)* yang kemudian diolah oleh LIPI dan BPS dengan menggunakan istilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsep ini di seajarkan dengan indikator pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan.

Lebih jauh terpenuhinya fasilitas kesehatan dan pendidikan bergantung pada kemampuan manusia yang bersangkutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maksudnya, fasilitas kesehatan dan pendidikan hanya bisa diperoleh dan ditingkatkan apabila mempunyai penghasilan yang memadai. Seseorang tidak mungkin memperoleh fasilitas kesehatan dan tingkat pendidikan yang memadai, kalau tidak mempunyai pekerjaan yang memberikan penghasilan yang mencukupi semua kebutuhan hidupnya.

Pembangunan manusia mencakup pula pembangunan jasmaniah terutama dalam hal pendidikan, kesehatan dan keadaan gizinya. Cara pandang pembangunan manusia sangat berbeda dari cara pandang pembangunan manusia dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi. Alasannya, konsep pembangunan ekonomi, cenderung lebih menekankan kepada peningkatan produk nasional bruto (PNB) sementara perbaikan kualitas hidup manusianya itu sendiri kadang terabaikan. Konsep pembangunan manusia mencoba menggabungkan dan melihat secara bersamaan semua isu pembangunan yang ditawarkan konsep pembangunan cara konvensional menjadi sebuah kesatuan yang saling mengisi dan menyempurnakan, bahkan saling memperkuat dan karenanya pendekatan yang digunakanpun bersifat komprehensif.

Dengan pemahaman itu tidak berarti bahwa konsep pembangunan manusia harus berseberangan dengan konsep pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi, apalagi dipersepsi sebagai anti pertumbuhan. Dengan pemahaman itu ditegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi hanyalah strategi dalam rangka pembangunan manusia.

Jika manusia dalam paradigma pembangunan lama cenderung diposisikan sebagai objek pembangunan, maka manusia dalam paradigma baru selalu ditempatkan sebagai pusat pembangunan.

Adapun jenis pembangunan yang akan dilakukan, maka proses maupun hasilnya harus bermula dan berakhir hanya untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya manusia dijadikan alat dan bahkan mungkin dikorbankan demi pembangunan.

2.1.2. Human Development Theory (Amartya Senn dan UNDP)

Setiap orang tentunya menginginkan berumur panjang, berilmu pengetahuan, bisa mengakses sumber-sumber penghidupan, pilihan untuk memperoleh kebebasan dan pilihan-pilihan lainnya. Hal inilah yang secara substansial dan esensial melatar belakangi lahirnya konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) yang pertama kali dicanangkan oleh UNDP pada tahun 1990, sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia sekaligus merupakan koreksi terhadap model pembangunan yang cenderung mengabaikan kepentingan manusia.

Kesejahteraan bukanlah seperti yang didefinisikan sebelumnya yaitu ukuran kepuasan dan konsumsi yang diukur dengan pendapatan atau GDP perkapita yang tidak memperhitungkan kondisi fisik tiap individu. Senn (1999) menggeser focus bahwa pendapatan adalah “alat” untuk membeli makanan, pendidikan dan kesehatan menjadi “tujuan” yaitu bergizi baik, berpendidikan dan sehat. Menurut Sen hak-hak individu terjadi oleh adanya kemampuan dan kesempatan untuk memperoleh kondisi kesejahteraan, dimana kesejahteraan itu bukan hanya pendapatan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, kebebasan ekonomi kemerdekaan sehingga UNDP mengeluarkan ukuran baru tentang tingkat kesejahteraan, yakni human development indeks (HDI). HDI merupakan indeks komposit dari pendidikan, kesehatan dan daya beli (pendapatan riil).

Penentuan tiga komponen itu tidak harus berarti pengabdian terhadap pilihan-pilihan lainnya, terutama pilihan untuk memperoleh kebebasan politik, jaminan atas hak asasi dan harga diri. Landasan pemikirannya, bahwa pembangunan manusia yang sesungguhnya tidak cukup hanya menyangkut upaya peningkatan kemampuannya melalui pembangunan seperti kesehatan, pendidikan dan sejenisnya. Pembangunan

manusia di sini juga harus mencakup segala upaya yang memungkinkan manusia bisa melakukan sesuatu dengan kemampuan dimilikinya.

Itu sebabnya, unsur pemberdayaan yang di dukung oleh adanya kebebasan politik menjadi begitu inti. Bahkan aspek kebebasan itu menjadi sangat penting karena tujuan utama pembangunan manusia itu sendiri tidak lebih dari upaya untuk menghilangkan rintangan – rintangan yang menghalangi atau menjegal manusia, dalam menentukan dan memperbanyak pilihan – pilihan yang dimilikinya. Itulah pula yang dimaksud dengan *human capability* dalam konsep Amartya Sen.

2.1.3 Development as freedom

Dalam *Development as freedom*, Sen (1999) menyelidiki hubungan antara kebebasan dan pembangunan manusia, dimana kebebasan adalah unsur pokok pembangunan manusia dan merupakan kunci untuk aspek – aspek lainnya. Berbeda dengan pandangan umum yang berfokus pada pendapatan dan kesehatan, atau kepuasan mental, Sen berfokus pada apa yang dia sebut kebebasan yang menekankan pada proses dan kesempatan.

Kebebasan adalah alat pembangunan manusia, dimana kebebasan itu termasuk kebebasan politik, fasilitas ekonomi, kesempatan sosial, transparansi dan keamanan, yang mana semuanya berbeda tetapi saling berhubungan.

Sen (1999) setuju bahwa kebebasan politik lebih penting daripada kebutuhan ekonomi dimana demokrasi merupakan tujuan kebebasan politik yang merupakan alat bagi orang – orang untuk berpendapat dan membentuk nilai dan norma. Hak politik, termasuk kebebasan mengekspresikan dan diskusi, tidak hanya sangat penting dalam merespon keperluan ekonomi, tetapi juga merupakan sentral konseptualisasi keperluan ekonomi. Hak politik juga penting untuk mendorong fungsi efektif demokrasi. Sen mengemukakan bahwa kelaparan biasanya di sebabkan oleh kekurangan kekuatan perdagangan bukan karena kekurangan makanan secara aktual. Kelaparan berskala besar tidak pernah terjadi dalam demokrasi dan Sen setuju tidak mungkin kelaparan dapat terjadi dalam system penghapusan otoritas dari informasi dan transparansi.

Fokus lain dari Sen (1999) adalah peranan wanita dalam pembangunan. Dia mengatakan bahwa tingkat pekerja wanita dan tingkat melek huruf wanita dapat meningkatkan daya tahan hidup anak dan menurunkan tingkat kelahiran. Kembali ke hak – hak manusia, Sen setuju bahwa tradisi Barat bukan hanya satu-satunya yang mempersiapkan kita untuk melakukan pendekatan berbasis kebebasan dan bahwa perbedaan dan pluralisme adalah norma, bukan pengecualian.

Sen (1999) lebih menekankan pentingnya pembangunan manusia (*human development*) sebagai “tujuan” daripada peranannya sebagai “*instrument*” dalam pembangunan ekonomi. Sen juga berpendapat bahwa dalam peranannya sebagai instrument dalam pembangunan ekonomi, pengusaha kemampuan dasar manusia lebih penting daripada berbagai kebijakan berorientasi pasar yang selama ini di rekomendasikan pada negara sedang berkembang.

Sen berpendapat bahwa pembangunan seharusnya merupakan proses peningkatan kebebasan yang membuat manusia lebih menikmati hidupnya. Terlalu sempit jika pembangunan hanya diidentifikasi dari peningkatan GNP ataupun tingkat industrialisasi. Selanjutnya Sen mengklarifikasi instrument kebebasan dalam lima kategori yang akan mendorong kemampuan umum orang untuk lebih menikmati hidup. Instrument – instrument tersebut adalah ; (1) kebebasan politik, (2) Fasilitas ekonomi, (3) kesempatan social, (4) jaminan transparansi dan (5) keamanan perlindungan.

Fasilitas ekonomi didefinisikan sebagai kesempatan penduduk untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi untuk tujuan konsumsi, produksi atau pertukaran.

Sedangkan kesempatan sosial didefinisikan sebagai kesempatan dan ketersediaan yang membuat masyarakat dapat memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya.

Dalam pandangan Sen (1999), kebebasan (kemudahan) akan meningkatkan pertumbuhan sebagaimana pertumbuhan akan meningkatkan fasilitas yang mendorong kebebasan (misal ekspansi pelayanan social). Dalam konteks ini Sen menggambarkan kontribusi pertumbuhan terhadap kesempatan sosial dalam bentuk pemerataan akses terhadap pendidikan yang terjadi di Jepang, Korea dan Taiwan. Walaupun pertumbuhan ekonomi dapat member fasilitas peningkatan berbagai

ukuran kesejahteraan, tetapi hubungan tersebut tidak otomatis. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Korea dan Taiwan disertai dengan peningkatan lama dan kualitas hidup, sedangkan di Brazil tidak. Sebaliknya, lama dan kualitas hidup juga tidak selalu dilandasi oleh pertumbuhan ekonomi. Negara seperti Srilangka dan Propinsi seperti Kerala (India) memiliki peningkatan lama dan kualitas hidup tanpa dukungan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi. Jadi Sen mengakui bahwa tingkat pendapatan merupakan factor penting bagi peningkatan standar hidup dan kesempatan social, tetapi tidak harus.

2.1.4 Pendapatan Per kapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan perkapitanya, maka dapat dikatakan semakin makmur negara tersebut.

PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product) adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan. PNB/GNP (Produk Nasional Bruto/Gross Nasional Product) adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu Negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk didalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Negara tersebut yang berada diluar negeri.

Adapun rumus untuk mencari $GNP = GDP - \text{Produk netto terhadap luar negeri}$. NNP (Net National Product) NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal. Rumus: $NNP = GNP - \text{Penyusutan}$. NNI (Net National Income) adalah jumlah

seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax).

Rumus: $NNI = NNP - \text{Pajak tidak langsung}$

PI (Personal Income) adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan social, pajak perseorangan dan ditambah dengan transfer payment.

Rumus: $PI = (NNI + \text{transfer payment}) - (\text{Laba ditahan} + \text{Iuran asuransi} + \text{Iuran jaminan social} + \text{Pajak perseorangan})$

DI (Disposable Income) adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya.

Rumus: $DI = PI - \text{Pajak langsung}$

Hubungan antara pendapatan nasional, penduduk dan pendapatan perkapita adalah pendapatan nasional pada dasarnya merupakan kumpulan pendapatan masyarakat suatu negara. Tinggi rendahnya pendapatan nasional akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan per kapita negara yang bersangkutan. Akan tetapi, banyak sedikitnya jumlah penduduk pun akan mempengaruhi jumlah pendapatan per kapita suatu negara. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan per kapita digunakan sebagai alat ukur tingkat kemakmuran suatu negara pada suatu periode.

Rumus Pendapatan perkapita : $IPC = \frac{GNP}{Pop}$

IPC : Pendapatan per kapita

GNP : Pendapatan Nasional

Pop :Jumlah Penduduk

2.1.5 Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan

Anggaran pendidikan merupakan alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Alokasi yang melalui belanja pemerintah pusat di transfer ke pemerintah daerah. Sementara anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah adalah DBH Pendidikan, DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan, DAU (Dana Alokasi Umum) Pendidikan, Dana Tambahan DAU, dan Dana Otonomi Khusus Pendidikan.

Biaya personal merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. BOS adalah Bantuan Operasional Sekolah yang menggantikan program JPS. BOS Bantuan Operasional Sekolah, merupakan dana kompensasi pendidikan yang pola distribusinya langsung ke sekolah. Keberadaannya membuka peluang bagi anak-anak kurang mampu untuk bisa meneruskan pendidikan. BOS juga memberi sumbangan besar bagi bertahannya sekolah/madrasah dalam penyelenggaraan sekolah akibat masih terasanya krisis ekonomi. BOS Buku adalah program untuk penyediaan buku teks pelajaran. Program BOS Buku digulirkan karena salah satu komponen penting dalam pembiayaan pendidikan adalah buku. Masyarakat kadang harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan buku paket pelajaran yang bermutu.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu, dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DIPA adalah Daftar Isian Pelaksana Anggaran EFA adalah Education for All (EFA) yang diprakarsai UNESCO. EFA menargetkan pada tahun 2015 semua penduduk dunia mempunyai akses yang sama dalam memperoleh pendidikan dasar berkualitas. FLS2N (Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional) adalah kegiatan akbar di bidang seni dan budaya yang melibatkan seluruh siswa-siswi jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, sekali dalam satu tahun. Para pesertanya adalah siswa -siswi yang lolos seleksi

2.1.6 Rasio Ketergantungan.

Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Rumus:

$$RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{65+}}{P_{(15-64)}} \times 100$$

RK : Rasio Ketergantungan

P₍₀₋₁₄₎ : Jumlah Penduduk Usia Muda (0 – 14 tahun)

P₆₅₊ : Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun ke atas)

P₍₁₅₋₆₄₎ : Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 – 64 tahun)

Kegunaan Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Misalnya rasio ketergantungan adalah sebesar 54,7 persen, artinya setiap 100 (seratus) orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Komposisi umur penduduk di suatu wilayah juga dapat dihubungkan dengan Dependency Ratio (DR) atau angka ketergantungan. Angka ketergantungan secara umum dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok umur produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok umur muda (kurang dari 15 tahun) dan kelompok umur tua (65 tahun ke atas). Semakin kecil Dependency Ratio, maka semakin kecil pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

2.1.7. Hubungan Pendapatan Per kapita, Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, rasio Ketergantungan dengan Indeks Pendidikan

a. Hubungan antara Pendapatan Per kapita dengan Indeks Pendidikan

Pendidikan berkaitan erat dengan pendapatan perkapita. Dana-dana pendidikan yang cukup besar hanya mungkin disediakan oleh masyarakat jika kondisi

kehidupan masyarakat tidak berada pada kategori miskin. Karena itu pendapatan perkapita merupakan salah satu alat untuk memenuhi permintaan pendidikan.

Banyak orang tua berpendapatan rendah beralasan tidak memasukkan anaknya ke sekolah dasar karena tidak mampu membayar iuran bulanan sekolah, membeli buku dan membayar kegiatan – kegiatan sekolah lainnya. Berbeda dengan keluarga yang pendapatannya tinggi, mereka mengeluarkan biaya lebih banyak pada pendidikan seperti mereka melakukannya pada barang dan jasa. Jadi bila pendapatan perkapita meningkat diharapkan indeks pendidikan juga meningkat.

b. Hubungan antara Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dengan Indeks Pendidikan

Kemauan pemerintah untuk membangun pendidikan memberi efek luas, terutama terhadap peningkatan jumlah anggaran yang diperlukan. Di daerah yang PDRBnya tidak meningkat secara memadai anggaran pendidikanpun tidak memadai untuk melakukan usaha-usaha pembaharuan. Hal ini disebabkan biaya pendidikan kian bertambah dari tahun ketahun. Biaya pendidikan secara umum ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Baik untuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan. Disamping mengeluarkan dana untuk keperluan pendidikan formal, pemerintah mengeluarkan dana untuk keperluan pendidikan dan latihan diluar kerangka formal itu.

Di Indonesia, anggaran pendidikan dialokasikan kedalam dua bentuk, yaitu anggaran rutin dan pembangunan, disamping dana pendidikan yang ditanggung langsung oleh masyarakat dan orang tua siswa atau mahasiswa. Jadi bila anggaran pemerintah bidang pendidikan meningkat diharapkan akan meningkatkan indeks pendidikan, begitu sebaliknya bila anggaran pemerintah bidang pendidikan menurun maka indeks pendidikan menurun.

c. Hubungan antara Rasio Ketergantungan dengan Indeks Pendidikan

Pendidikan dengan rasio ketergantungan mempunyai hubungan yang erat. Jika rasio ketergantungan tinggi maka pendapatan perkapita menurun. Dengan

pendapatan yang sama orang tua terpaksa member makan anak-anak yang lebih banyak. Itu berarti sebagian terbesarpendapatan terpakai untuk pengeluaran konsumsi. Akibatnya sebagian pendapatan yang digunakan untuk menyekolahkan anak menjadi sedikit, sehingga mereka tidak bisa membiayai sekolah anak-anaknya. Sebaliknya bila rasio ketergantungan rendah maka pendapatan mereka tidak hanya untuk membiayai konsumsi anak-anaknya saja tapi bisa juga digunakan untuk membiayai knsumsi anak-anaknya saja tapi bisa juga digunakan untuk membiayai pendidikan. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio ketergantungan tinggi maka indeks pendidikan akan menurun dan bila rasio ketergantungan rendah maka indeks pendidikan akan meningkat.

2.1.8. Pembangunan dalam bidang pendidikan.

Pembangunan pendidikan langsung atau tidak langsung berfokus pada pemikiran pemikiran hipotetik, seberti berikut ini:

1. Perbaikan mutu proses dan produk pendidikan dan pembelajaran serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan merupakan factor penting dalam proses kemajuan umat manusia.
2. Ciri utama manusia yang beradap adalah senantiasa berusaha memperoleh pendidikan secara lebih baik, bahkan lebih hebat.
3. Pendidikan minimal yang harus diterima penduduk adalah pendidikan dasar formal atau pendidikan luar sekolah yang berfungsi untuk memberantas buta huruf atau memberikan bekal keterampilan minimal bagi para pekerja.
4. Pembangunan pendidikan mempunyai kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dana-dana pendidikan dalam jumlah yang cukup hanya mungkin dapat disediakan oleh pemerintah dan masyarakat, jika perekonomian suatu negara tumbuh secara baik dan kondisi kehidupan masyarakat tidak berada pada kategori miskin.
5. Pendidikan merupakan proses moderenisasi pekerja.moderenisasi pekerja diperlukan sejalan dengan peningkatan persyaratan yang diperlukan untuksetiap jenis pekerjaan, mulai pekerja sector tradisional sampai sector pekerja modern.

6. Aspirasi masyarakat untuk memasuki pendidikan dan kemauan pemerintah untuk membangun pendidikan member efek luas terhadap peningkatan jumlah anggaran yang diperlukan.
7. Pengembangan pendidikan dimasa depan merupakan prasyarat bagi upaya meningkatkan mutu pekerja, terutama keterampilannya.
8. Antara pendidikan dan pembangunan ekonomi terdapat hubungan yang saling terkait atau reciprocal relationship.
9. Pendidikan yang dicapai oleh seorang pekerja merupakan prediktor pendapatannya dalam pekerjaan. Tingginya rata-rata penghasilan seseorang dalam bekerja merupakan cerminan dari tingginya tingkat produksi dan hal itu menjadi indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara.
10. Di negara-negara yang GNP-nya tidak meningkat secara memadai anggaran pendidikan pun tidak memadai untuk melakukan usaha-usaha pembaharuan. Hal ini disebabkan biaya pendidikan kian bertambah dari tahun ketahun.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ranis dan Ramirez (1998) menemukan bahwa perilaku pemerintah berperan penting pada pembangunan manusia melalui pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan serta penyediaan infrastruktur dan juga menemukan korelasi negative antara tingkat pendidikan perempuan dan tingkat kelahiran.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh terhadap keberhasilan bidang pendidikan

Ranis dan Ramirez (1998) menguji hipotesa dengan meregres antar negara selama tahun 1960-1992. Sampel terdiri dari 35 sampai 76 negara berkembang. Mereka menggunakan lag variable sebagai instrument untuk menurunkan bias simultanitas sebagai akibat OLS.

Aloysius (2002) menemukan bahwa investasi sector public untuk bidang social (pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan), investasi swasta dan distribusi pendapatan membawa manfaat bagi pembangunan manusia dan kesejahteraan penduduk.

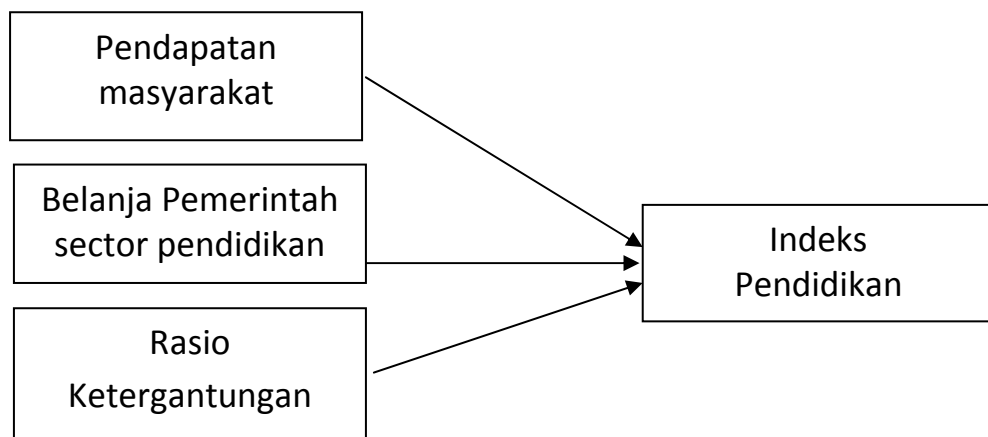
Artikel ini melakukan pembuktian empiris mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat

pembangunan manusia dalam konteks regional (antar propinsi) di Indonesia dan hubungan antara tingkat pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan.

Menurut Penelitian sKnowles (2000) diseluruh wilayah Asia beban ketergantungan yang rendah karena adanya pengurangan tingkat fertilitas dan pelebaran jarak kelahiran berhubungan dengan peningkatan dibidang kesehatan ibu dan anak, gizi dan pendidikan. Fertilitas yang tinggi berimplikasi pada angka ketergantungan rasio, jumlah orang yang tergantung (biasanya anak-anak) dipopulasi dibandingkan dengan jumlah orang dewasa ditempat kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa angka ketergantungan penduduk mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan pendidikan. Semakin tinggi angka ketergantungan penduduk maka semakin rendah keberhasilan bidang pendidikan.

Menurut Komar (2004) diseluruh Indonesia salah satu masalah pendidikan adalah karena terbatasnya kemampuan ekonomi, dan bertambahnya pendidikan sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan perkapita maka akan semakin tinggi keberhasilan di bidang pendidikan.

2.3 Kerangka Analisis



Gambar 2.1
Kerangka Analisis Penelitian

2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori maupun penelitian-penelitian sebelumnya, dapat diduga adanya pengaruh pendapatan per kapita, belanja pemerintah bidang pendidikan dan rasio ketergantungan terhadap indeks pendidikan. Indeks pendidikan akan semakin tinggi jika pendapatan masyarakat dan belanja pemerintah bidang pendidikan semakin rendah dan rasio ketergantungan semakin rendah. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: “Diduga pendapatan per-kapita, belanja pemerintah bidang pendidikan, dan rasio ketergantungan mempunyai pengaruh terhadap indeks pendidikan di Kabupaten Musi Rawas”

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan *exploratory*. Pendekatan Exploratory bertujuan memberikan gambaran, wawasan dan pemahaman atas situasi permasalahan yang dihadapi. Metode *exploratory* dari analisis digunakan untuk menggiring kepada hipotesis. Sedangkan dalam melakukan analisis kuantitatif dipergunakan alat bantu ekometrika dengan menggunakan data time series (tahun 1997 - tahun 2011). Penelitian ini membatasi pembuktian pengaruh dari variable tingkat pendapatan masyarakat, belanja pemerintah sektor pendidikan dan rasio ketergantungan sebagai variable indeviden terhadap indeks pendidikan menggunakan uji regresi sederhana OLS (*Ordinary Least Square*).

3.2. Definisi Operasional

- a. Indeks pendidikan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun lainnya). Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dihitung pada penduduk usia 15 tahun keatas dengan pertimbangan mereka dianggap sebagai penduduk dewasa sehingga mampu melakukan pilihan-pilihan dalam hidup secara mandiri diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.
- b. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata anak mengikuti pendidikan formal mulai dari Sekolah Dasar(pendidikan SD/MI), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/MA dan Sekolah Kejuran).
- c. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung dengan dua variabel simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas diseluruh jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Penghitungan indeks Pendidikan : $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah).
- d. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan

nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan perkapitanya, maka dapat dikatakan semakin makmur negara tersebut. Indikator yang dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai terjadinya peningkatan atau penurunan dalam kegiatan ekonomi suatu daerah dengan memperhatikan nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran masyarakat pada daerah tersebut. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat dinamika perekonomian suatu daerah adalah PDRB per kapita untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Hubungan antara pendapatan nasional, penduduk dan pendapatan perkapita adalah pendapatan nasional pada dasarnya merupakan kumpulan pendapatan masyarakat suatu negara. Tinggi rendahnya pendapatan nasional akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan per kapita negara yang bersangkutan. Akan tetapi, banyak sedikitnya jumlah penduduk pun akan mempengaruhi jumlah pendapatan per kapita suatu negara.

- e. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk berusia 0-14 tahun ditambah penduduk berusia di atas 65 tahun dan jumlah penduduk berusia 15-64 tahun. Angka tersebut menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh golongan penduduk umur produktif. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Rumus:

$$RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{65+}}{P_{(15-64)}} \times 100$$

RK : Rasio Ketergantungan

P₍₀₋₁₄₎ : Jumlah Penduduk Usia Muda (0 – 14 tahun)

P₆₅₊ : Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun ke atas)

P₍₁₅₋₆₄₎ : Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 – 64 tahun)

Kegunaan Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency

ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Misalnya rasio ketergantungan adalah sebesar 54,7%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Komposisi umur penduduk di suatu wilayah juga dapat dihubungkan dengan Dependency Ratio (DR) atau angka ketergantungan. Angka ketergantungan secara umum dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok umur produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok umur muda (kurang dari 15 tahun) dan kelompok umur tua (65 tahun ke atas). Semakin kecil Dependency Ratio, maka semakin kecil pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data Sekunder yang bersumber dari BPS dan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan dokumensasi dari BPS Kabupaten Musi Rawas tahun 1997-2011

3.5 Metode Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh-faktor-faktor pendapatan perkapita, belanja pemerintah bidang pendidikan dan rasio ketergantungan terhadap indeks pendidikan digunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1t} + \alpha_2 X_{2t} + \alpha_3 X_{3t} + \mu_t$$

Dimana :

Y = Indeks Pendidikan di Kabupaten Musi Rawas tahun t

X_{1t} = Pendapatan per kapita Kabupaten Musi Rawas tahun t

X_{2t} = Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas
bidang Pendidikan pada tahun t

X_{3t} = Rasio ketergantungan di Kabupaten Musi Rawas pada
tahun t

μ_t = galat/kesalahan (5%).

3.6 Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Hal ini diduga terjadi bila koefisien determinasi (R^2) tinggi, nilai uji F tinggi tetapi t dari parameter tidak signifikan. Multikolinearitas merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asumsi model klasik sehingga dapat mengakibatkan kesalahan baku (standart error) membesar, tingkat keyakinan (level of significant) merendah, salah satu atau beberapa koefisien regresi tidak signifikan, meskipun koefisien determinasinya tinggi, penaksir OLS dan simpangan baku sensitife terhadap perubahan data yang kecil.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hopotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nilai du dan dl dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan.

3. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidak samaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas terjadi apabila residuel model regresi yang kita punyai mempunyai varian yang tidak konstan. Heteroskedastisitas dapat kita kurangi dengan beberapa cara antara lain dengan mentransformasikan data dalam bentuk logaritma dan membagi model regresi asal dengan salah satu dengan variable independent yang digunakan dalam model. Selain mengurangi heroskedastisitas, transformasi data dalam bentuk logaritma akan menghasilkan koefisien regresi sekaligus merupakan elastisitas variable independent. Namun demikian untuk mendeteksi terjadi tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan white heteroskedastisity test. Metode yang digunakan adalah metode white. Hal ini white mengembangkan sebuah metode yang tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada residual.

4. Uji Stasioner

Didalam menguji apakah data mengandung akar unit atau tidak, Dickey-Fuller menyarankan untuk melakukan regresi model-model berikut ini:

$$\Delta Y_t = \phi Y_{t-1} + e_t \dots\dots\dots (1)$$

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \phi Y_{t-1} + e_t \dots\dots\dots (2)$$

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \phi Y_{t-1} + e_t \dots\dots\dots (3)$$

Dimana t adalah variabel trend waktu.

Perbedaan persamaan (1) dengan dua regresi yang lainnya adalah memasukan konstanta dan variabel trend waktu. Dalam setiap model, jika data *time series* mengandung *unit root* yang berarti data tidak stasioner hipotesis nulnya adalah $\phi=0$. Sedangkan hipotesis alternatifnya $\phi<0$ yang berarti data stasioner.

Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik DF dengan nilai kritisnya yakni distribusi statistic t . Nilai statistik DF ditunjukkan oleh nilai t statistic koefisien ϕY_{t-1} . Jika nilai absolute statistic DF lebih besar dari nilai kritisnya maka kita menolak

hipotesis nul sehingga data yang diamati menunjukkan stasioner. Sebaliknya data tidak stasioner jika nilai absolute nilai statistik DF lebih kecil dari nilai kritis distribusi statistik t_c .

Salah satu asumsi dari uji persamaan (1) – (3) adalah bahwa residual e_t sering kali saling berhubungan atau mengandung unsur autokorelasi. Dickey-Fuller kemudian mengembangkan uji akar unit dengan memasukan unsur autokorelasi dalam modelnya yang dikenal dengan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Dalam praktiknya uji ADF inilah yang sering kali digunakan untuk mendeteksi apakah data stasioner atau tidak. Adapun formulasi uji ADF sebagai berikut :

$$\Delta Y_t = \gamma Y_{t-1} + \sum \beta_i \Delta Y_{t-1+i} + e_t \dots \dots \dots (4)$$

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \gamma Y_{t-1} + \sum \beta_i \Delta Y_{t-1+i} + e_t \dots \dots \dots (5)$$

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 T + \gamma Y_{t-1} + \sum \beta_i \Delta Y_{t-1+i} + e_t \dots \dots \dots (6)$$

Dimana:

Y = Variabel yang diamati

$$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$$

T = trend waktu

Prosedur untuk menentukan data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistic ADF ditunjukan oleh nilai t statistik koefesienya ΔY_{t-1} pada persamaan (4) sampai (6). Jika nilai absolute statistic ADF lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stasioner dan jika sebaliknya nilai absolute statistic ADF lebih kecil dari nilai kritisnya maka data tidak stasioner. Hal krusial dalam uji ADF ini adalah menentuka panjangnya pelambanan. Panjangnya kelambanan bisa ditentukan berdasarkan criteria AIC ataupun SC.

3.7 Pengujian Good Ness Offit

Dalam melakukukan penelitian, untuk keabsahan suatu model perlu dilakukan pengujian-pengujian statistik sebagai berikut:

1. Uji Keseluruhan (F–stat)

Uji F-stat ini digunakan untuk menguji signifikansi seluruh variable independent secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dependent atau untuk melihat pengaruh variabel - variabel independent secara bersama-sama terhadap variable dependent.

Dalam penelitian ini yang menjadi hipotesis adalah:

Ho : Tidak ada pengaruh pendapatan per kapita, belanja pemerintah dan angka ketergantungan terhadap indeks pendidikan di kabupaten Musi Rawas tahun 1997-2012.

Ha : Ada pengaruh pendapatan per kapita, belanja pemerintah dan angka ketergantungan terhadap indeks pendidikan di kabupaten Musi Rawas tahun 1997-2012.

Adapun langkah uji F adalah sebagai berikut:

Membandingkan nilai F hitung dan nilai F table pada tingkat kepercayaan tertentu . Ho tidak ditolak apabila F hitung kurang dari F tabel dan sebaliknya Ho ditolak bila F hitung melebihi F tabel yang artinya semua variabel independent mempengaruhi variable dependent secara bersama-sama pada tingkat kepercayaan tertentu.

2. Uji Parsial (t-stat)

Uji ini digunakan untuk menguji signifikan setiap variabel independent dalam mempengaruhi atau menjelaskan variabel dependent. Pengujiannya adalah sebagai berikut :

a. Membuat hipotesis melalui uji satu sisi atau dua sisi. Uji hipotesis dua sisi:

$$Ho : \beta_i = 0$$

$$Ha : \beta_i \neq 0$$

b. Kita ulangi langkah pertama tersebut untuk β

c. Menghitung nilai t hitung untuk β_i dan β_2 dan mencari nilai t kritis dari tabel distribusi t . Nilai t hitung dicari dengan formula sebagai berikut :

$$t = \frac{\hat{\beta}_i - \beta_i^*}{\text{se } \hat{\beta}_i}$$

Dimana β_i^* merupakan nilai pada hipotesis nul

d. Membandingkan nilai t hitung untuk masing-masing estimator dengan t kritisnya dari tabel. Keputusan menolak atau menerima Ho sebagai berikut:

Jika nilai hitung > nilai t kritis maka Ho ditolak atau menerima Ha

Jika nilai hitung < nilai t kritis maka Ho diterima atau menolak Ha

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama-sama memberi penjelasan terhadap variabel dependen. Menurut Gujarati (1993), nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$) semakin besar nilai R^2 maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variable dependen.